



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Kehutanan dapat berjalan baik dan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di Dinas Kehutanan, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.

5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah Standar Operasional Prosedur Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SOP Dinas Kehutanan sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

SOP Dinas Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Dinas Kehutanan.

Pasal 5

(1) SOP Dinas Kehutanan meliputi :

- a. SOP Administrasi, meliputi :
 - 1) Penyusunan Penetapan Kinerja;
 - 2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
 - 3) Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 4) Penyusunan Renja;
 - 5) Penyusunan Renstra;
 - 6) Penyusunan Laporan Semester;
 - 7) Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan SPP-SPM;

- 8) Pelaksanaan Pengajuan SPP-SPM;
- 9) Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan;
- 10) Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan;
- 11) Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala;
- 12) Pengurusan Kenaikan Pangkat Reguler;
- 13) Pengadministrasian Surat Masuk;
- 14) Pengadministrasian Surat Keluar;
- 15) Penyusunan IKM;
- 16) Penyusunan LPPD;
- 17) Penyusunan LKPJ;
- 18) Penyusunan RKA;
- 19) Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun;
- 20) Surat Permohonan Cuti;
- 21) Pengurusan Surat Cuti PNS Non Struktural;
- 22) Usulan Cuti PNS Struktural;
- 23) Penyusunan Buku Kenaikan Gaji Berkala;
- 24) Penyusunan Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat;
- 25) Penyusunan LAKIP;

b. SOP Teknis, meliputi :

- 1) Pulahta Pengujian Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan;
- 2) Pulahta Eksploitasi dan Penyajian Data Pengolah Hasil Hutan;
- 3) Pulahta Pembenihan;
- 4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan;
- 5) Pemantau Hasil Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan;
- 6) Pulahta Rehabilitasi dan Konservasi Tanah;
- 7) Pulahta Pengamanan Hutan;
- 8) Pengolahan Peta Hutan dan DAS;
- 9) Penyusunan Tata Ruang Kawasan Hutan; dan
- 10) Pulahta Kawasan Hutan, DAS dan Di Luar Kawasan Hutan.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2014
BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 173